



ປະທັບສູນກາງສະພາບາງຄະນະ

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**

ກະຊວງສຳນັກງານງົບປະມານສຳນັກງານສູນກາງ

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

ຄະນະສຳນັກງານສູນກາງສະພາບາງຄະນະສຳນັກງານສູນກາງສຳນັກງານສູນກາງສຳນັກງານສູນກາງ

Jl. Melati No. 17 Denpasar, Telepon (0361) 237919, 237920 Fax 237921

Denpasar, 17 Oktober 2023

Kepada :

Yth. Kepala Bappeda Kota Denpasar

di –

Denpasar

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 900/ 1729 /Sekret.DPRD

No.	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2023	1 ( Satu ) Gabung	Menindaklanjuti Surat 050/1276/Bappeda perihal Permintaan Renja PD. Dikirim untuk dapat dipergunakan dan/atau ditindaklanjuti sebagai mana mestinya.
2.	Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2024		

Dikirim tanggal :  
Yang Menerima :



Sekretaris DPRD Kota Denpasar

I. I. Gae Made Bhaju Pravita, MM  
NIP. 196811141998031003



PEMERINTAH  
KOTA DENPASAR



SEKRETARIAT DPRD

# RENCANA KERJA 2024

SEKRETARIAT  
DPRD KOTA DENPASAR

✉ [dprdkotadps@gmail.com](mailto:dprdkotadps@gmail.com)

🌐 [www.dprd.denpasarkota.go.id](http://www.dprd.denpasarkota.go.id)



WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA  
BERENCANA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut dengan RPJMD Kota Denpasar adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Semesta Berencana 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Bali adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Bali untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

## BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 2

- (1) RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJPD Kota Denpasar, RKP dan RKPD Provinsi Bali.

### Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan sebagai:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. Pedoman penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD Tahun 2024; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dan seluruh Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2024.

### Pasal 4

- (1) Substansi RKPD memuat perencanaan pembangunan tahunan Daerah yang tertuang dalam sistematika sebagai berikut:

- Bab I      Pendahuluan
- Bab II     Gambaran Umum Kondisi Daerah  
            Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
- Bab IV     Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- Bab V     Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- Bab VI     Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Bab VII    Penutup

(2) Penjabaran substansi RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 7 Juli 2023

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 25



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/2607/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR  
TAHUN 2024

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar menyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar sebagai dokumen perencanaan Periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tahapan awal persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
6. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

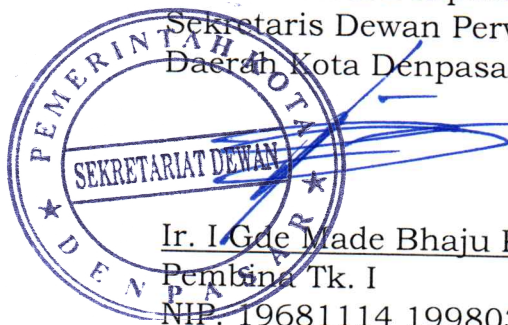
Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Tahun 2024;
  - b. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah Unsur Pendukung Urusan Pemerintah;
  - c. menyusun dokumen Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Tahun 2024;
  - d. mengkoordinasikan penetapan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Tahun 2024;
  - e. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 23 Nopember 2022

a.n. Walikota Denpasar,  
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kota Denpasar



Ir. IGde Made Bhaju Pravita, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681114 199803 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Walikota Denpasar
  2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
  3. Inspektur Kota Denpasar
  4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
  5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
  6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
  7. Arsip

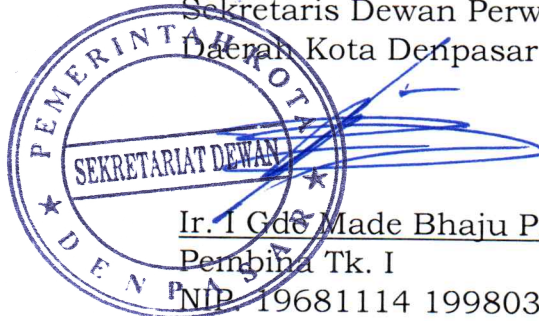
LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR  
TANGGAL : 23 NOPEMBER 2022  
NOMOR : 188.45/2607/HK/2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA  
KERJA SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
DENPASAR TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024

- Penasehat : 1. Walikota Denpasar  
2. Wakil Walikota Denpasar
- Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar  
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretaris Daerah Kota Denpasar  
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris  
Daerah Kota Denpasar  
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota  
Denpasar
- Ketua : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota  
Denpasar
- Sekretaris : Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
- Anggota : 1. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan  
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota  
Denpasar  
2. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan  
Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kota Denpasar  
3. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian  
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota  
Denpasar

4. Seluruh Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar

a.n. Walikota Denpasar,  
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kota Denpasar



Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681114 199803 1 003

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**



**RANCANGAN**

**RENCANA KERJA (RENJA)**

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA DENPASAR  
TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU 6	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD .....	17
2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar.....	18
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD	28
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	28
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar .....	28
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	29
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD	40
BAB V PENUTUP	43

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun Sebelumnya .....	7
Tabel 2.2 Capaian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Denpasar .....	8
Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kota Denpasar .....	11
Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Denpasar .....	14
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Denpasar .....	18
Tabel 2.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kota Denpasar.....	23
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis .....	29
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Denpasar .....	32
Tabel 4.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2024 ....	40

## KATA PENGANTAR

### **Om Swastyastu,**

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas Asung Kertha Wara NugrahaNya, kami telah berhasil menyusun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2023. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Perubahan Rencana Kerja ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman melaksanakan program dan kegiatan dalam memenuhi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan. Perumusan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Denpasar mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini menjadi upaya dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Kota Denpasar Tahun 2023 dan target kinerja RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Kami berharap penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2023 ini, tetap merepresentasikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD serta tugas dan fungsi DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini. Selanjutnya, kami berharap agar Perubahan Rencana Kerja ini dapat dipergunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Denpasar yang lebih baik.

### **Om Shanti, Shanti, Shanti Om**

Denpasar, 25 Agustus 2023  
Sekretaris DPRD Kota Denpasar



Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM  
NIP. 196811141998031003

# BAB I

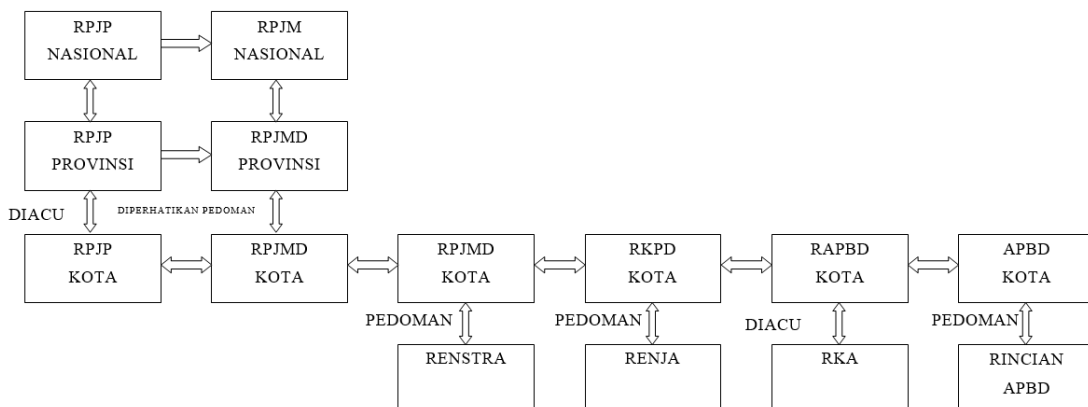
## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional untuk SKPD adalah Renja-SKPD. Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Menindaklanjuti amanat tersebut di atas, Sekretariat DPRD Kota Denpasar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar menyusun rencana pembangunan tahunan perangkat daerah berupa Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2024, dengan mengacu pada dokumen perencanaan sebagaimana tersebut dalam uraian di atas, juga disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2024 adalah rencana pembangunan tahunan yang disusun untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Denpasar yaitu “*Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju*”. Misi yang diemban oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah misi 3 yaitu **“Kejujuran dan Spirit Sewakadarma Sebagai Penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)”**. Keterkaitan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam mekanisme pelaksanaan pembangunan daerah seperti dalam gambar di bawah ini :



## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Bali Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
19. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 31);

20. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 52);
21. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);
22. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 25); dan
23. Surat Edaran Nomor 903/139/BAPPEDA/2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2024 adalah sebagai penjabaran program dan kegiatan yang secara operasional untuk mewujudkan visi misi dan program kerja Walikota Denpasar selama 1 (satu) tahun. Tujuan disusunnya rencana kerja adalah :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai penjabaran Renstra selama 1 (satu) tahun.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran program / kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Sekretariat DPRD yang meliputi:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II Hasil Evaluasi Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.

- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- BAB III Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD
  - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD
  - 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD
  - Bab ini menyajikan tentang rumusan program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif.
- BAB V Penutup
  - Bab ini menyajikan tentang ringkasan rencana kerja dan tindak lanjut pelaksanaannya.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD**

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2022 adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2021-2026. Terkait dengan hal tersebut Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar perkiraan capaian tahun berjalan 2022.

Evaluasi bertujuan untuk menindaklanjuti realisasi pencapaian kinerja dan kendala yang dihadapi selama pencapaian rencana kerja bersangkutan melalui perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi renja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output dari pelaksanaan fisik kegiatan dan keuangan. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar sampai dengan tahun 2022.

Sekretariat DPRD Kota Denpasar merupakan unsur pendukung urusan pemerintah daerah, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tersedianya peraturan daerah				5 buah	5 buah	5 buah	23 buah	21 buah	6	13	8	15	7	52%	104%	136%	65,21%	33,33%
2	Tersedianya keputusan rapat yang ditindak lanjut				18 keputusan	18 keputusan	7 keputusan	18 keputusan	18 keputusan	23	18	18	19	21	32%	67%	90%	114%	116,67 %
3	Tersedianya dokumen serapan aspirasi masyarakat/ konstituen sebagai pokok-pokok pikiran Dewan				3 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3	2	3	3	3	43%	57%	79%	100%	100%

Indikator Kinerja		Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	85%	85,62%	100,72%	86%	87,71%	101,98%
2	Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi Pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Tabel 2.2**  
**Capaian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Denpasar**

Uraian	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
<b>1 Belanja Operasi</b>	<b>67.398.631.640</b>	<b>58.838.022.155</b>	<b>87.30%</b>	<b>79.572.064.147</b>	<b>66,741,095,946</b>	<b>83.88%</b>
Belanja Pegawai	49.708.936.929	48.122.725.513	96.81%	50.450.007.232	50,126,127,588	99.36%
Belanja Barang dan Jasa	17.689.694.711	10.715.296.642	60.57%	29.122.056.915	16,614,968,358	57.05%
<b>2 Belanja Modal</b>	<b>143.895.000</b>	<b>130.668.000</b>	<b>90.81%</b>	<b>427.059.700</b>	<b>363,417,000</b>	<b>85.10%</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	143.895.000	130.668.000	90.81%	427.059.700	363,417,000	85.10%
<b>Jumlah</b>	<b>67.542.526.640</b>	<b>58.968.690.155</b>	<b>87.31%</b>	<b>79.999.123.847</b>	<b>67.104.512.946</b>	<b>83.88%</b>

Penjabaran review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

**1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Realisasi pelaksanaan rencana kerja tahun anggaran 2022 dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi Pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan tidak ada yang tidak memenuhi target. Seluruh fasilitasi kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Denpasar. Namun, terdapat beberapa sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja yaitu :

- 1) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- 2) Pengawasan Penggunaan Anggaran
- 3) Pengawasan Kode Etik DPRD, dan
- 4) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, belum memenuhi target kinerja yang direncanakan Sekretariat DPRD Kota Denpasar yaitu sebanyak 45 orang. Sedangkan realisasi fasilitasi pelaksanaan Medical Check Up DPRD sebanyak 32 orang, hal ini karena 13 orang anggota dewan lainnya tidak mengikuti Medical Check Up.

Untuk sub kegiatan point 1 sd. 3, sejak tahun 2021 juga tidak terrealisasi karena pelaksanaannya bersifat tentatif. Sehingga tidak dapat dihapus dari rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar.

**2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Realisasi pelaksanaan rencana kerja tahun anggaran 2022 dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi Pembentukan Perda, Penganggaran dan

Pengawasan telah memenuhi target yaitu 100%. Artinya, pelaksanaan 2 program dengan 15 kegiatan di Sekretariat DPRD Kota Denpasar telah direalisasikan untuk memfasilitasi rencana kerja yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Denpasar.

### **3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan**

Realisasi pelaksanaan rencana kerja tahun anggaran 2022 pada level program, yang melebihi target kinerja dari yang direncanakan adalah perolehan indeks kepuasan pelayanan kesekretariatan DPRD yang merupakan indikator kinerja dari Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Indeks kepuasan yang ditargetkan sebesar 86% dan realisasinya mencapai 87,71%. Pencapaian tersebut juga telah melebihi target kepuasan pelayanan Pemerintah Kota Denpasar yaitu 87,66%. Sedangkan untuk level kegiatan tidak ada yang melebihi target kinerja dari yang direncanakan. Namun untuk sub kegiatan, terdapat kegiatan yang melebihi target kinerja dari yang direncanakan tercantum pada tabel 2.3. Hal ini disebabkan karena, meningkatnya kegiatan-kegiatan DPRD yang perlu difasilitasi.

### **4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan**

Faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah:

1. Tersedianya anggaran yang cukup memadai.
2. Tersedianya jumlah pegawai yang cukup memadai.
3. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.
4. Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.
5. Penggunaan teknologi yang semakin berkembang sehingga pelayanan publik dapat diberikan dengan mudah, cepat dan tepat sasaran.
6. Dukungan kebijakan dan komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Denpasar.
7. Keterbukaan informasi dan kemudahan komunikasi serta koordinasi dengan stakeholder.
8. Adanya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian nilai akhir kinerja sasaran adalah :

1. Kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. Kurang disiplin dan motivasi kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas dan wewenang DPRD.
4. Kurangnya inovasi dan kreatifitas SDM dalam upaya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
5. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan DPRD.
6. Belum optimalnya pemanfaatan kelompok pakar dan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
7. Semakin besarnya kuantitas agenda kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat.
8. Dinamika politik yang bersifat dinamis atau berubah-ubah mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
9. Belum optimalnya pengendalian internal di Sekretariat DPRD Kota Denpasar.

#### **5. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah**

Implikasi atau akibat langsung yang dapat ditimbulkan dari target yang telah ditetapkan adalah realisasi program/kegiatan yang tercapai di tahun 2022 menjadi realisasi tahun ke-1 dalam renstra tahun 2021-2026. Capaian tersebut dapat digunakan sebagai data dan informasi untuk pengambilan keputusan / kebijakan dalam rangka pemenuhan target kinerja di tahun ke-2 dan seterusnya. Menuju pelayanan birokrasi yang baik dan akuntabel serta meningkatkan proses penatausahaan pelayanan administrasi dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.

#### **6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**

Strategi pemecahan masalahnya adalah :

1. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan ASN dan DPRD dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya.
2. Meningkatkan intensitas rapat koordinasi/evaluasi secara berkala antar pemangku kepentingan.

3. Mengoptimalkan perekrutan dan pemanfaatan kelompok pakar AKD untuk meningkatkan kinerja DPRD.
4. Mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

**Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kota Denpasar**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Tahun 2022
1	2	3	4	5
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4.02	SEKRETARIAT DPRD			
<b>4.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4.02.01.2.01	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja keuangan sebagai alat penilaian dan evaluasi Sekretariat DPRD	100%	100%
4.02.01.2.01.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan Renstra dan Renja	3 Dokumen	3 Dokumen
4.02.01.2.02	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	100%
4.02.01.2.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan	38 Dokumen	38 Dokumen
4.02.01.2.06	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang selesai dengan baik dan tepat waktu	100%	100%
4.02.01.2.06.02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%
4.02.01.2.06.03	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penyediaan peralatan rumah tangga	100%	100%
4.02.01.2.06.04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	100%	100%
4.02.01.2.06.05	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	100%
4.02.01.2.06.06	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	100%
4.02.01.2.06.09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase fasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	100%
4.02.01.2.08	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa pelayanan penunjang kantor yang selesai dengan baik dan berkualitas	100%	100%
4.02.01.2.08.02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100%	100%
4.02.01.2.08.04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100%	100%
4.02.01.2.09	5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%
4.02.01.2.09.01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	100%	100%
4.02.01.2.09.02	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Tahun 2022
1	2	3	4	5
4.02.01.2.09.07	- <i>Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</i>	Persentase pemeliharaan aset tetap lainnya	100%	100%
4.02.01.2.09.10	- <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	100%	100%
4.02.01.2.14	6 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pencapaian pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	100%	100%
4.02.01.2.14.01	- <i>Fasilitasi Keprotokolan</i>	Persentase fasilitasi keprotokolan	100%	100%
4.02.01.2.15	7 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD	100%	100%
4.02.01.2.15.01	- <i>Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD</i>	Jumlah administrasi keuangan DPRD yang dapat diselesaikan tepat waktu	14 Dokumen	14 Dokumen
4.02.01.2.15.02	- <i>Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD</i>	Jumlah pengadaan pakaian dinas DPRD	45 Stel	45 Stel
4.02.01.2.15.03	- <i>Pelaksanaan Medical Check Up DPRD</i>	Jumlah pelaksanaan medical check up DPRD	45 Orang	32 Orang
4.02.01.2.16	8 Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD	100%	100%
4.02.01.2.16.02	- <i>Fasilitasi Fraksi DPRD</i>	Jumlah rapat fraksi	20 kali	25 Kali
4.02.01.2.16.03	- <i>Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>	Jumlah rapat rapat DPRD	14 Kali	19 Kali
<b>4.02.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>1 Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		<b>2 Persentase kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD</b>	<b>86%</b>	<b>87.71%</b>
4.02.02.2.01	1 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%
4.02.02.2.01.01	- <i>Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>	1 Jumlah dokumen rapat pembahasan bapemperda	2 Dok	13 Dok
		2 Persentase pelaksanaan perdin Bapemperda	100%	100%
4.02.02.2.01.02	- <i>Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>	1 Jumlah dokumen rapat pembahasan Ranperda	12 Dokumen	19 Dokumen
		2 Persentase pelaksanaan perdin Pansus	100%	100%
4.02.02.2.01.04	- <i>Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/ atau Naskah Akademik</i>	Jumlah dokumen rapat penyusunan naskah akademik	2 Dokumen	2 Dokumen
4.02.02.2.02	2 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase penyelenggaraan pembahasan kebijakan anggaran tepat waktu	100%	100%
4.02.02.2.02.01	- <i>Pembahasan KUA dan PPAS</i>	1 Jumlah dokumen rapat pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	5 Dokumen
		2 Persentase pelaksanaan perdin Badan Anggaran	100%	100%
4.02.02.2.02.02	- <i>Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>	Jumlah dokumen rapat pembahasan perubahan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen
4.02.02.2.02.03	- <i>Pembahasan APBD</i>	Jumlah dokumen rapat pembahasan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen
4.02.02.2.02.04	- <i>Pembahasan APBD Perubahan</i>	Jumlah dokumen rapat pembahasan APBD perubahan	2 Dokumen	3 Dokumen
4.02.02.2.02.06	- <i>Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>	Jumlah dokumen rapat pembahasan pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	4 Dokumen
4.02.02.2.03	3 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase penyelenggaraan pengawasan sesuai tugas dan fungsi DPRD	100%	9765%
4.02.02.2.03.01	- <i>Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum</i>	1 Jumlah dokumen rapat pengawasan bidang Pemerintahan dan Hukum	4 Dok	9 Dokumen
		2 Persentase pelaksanaan perdin bidang Pemerintahan dan Hukum	100%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Tahun 2022
1	2	3	4	5
4.02.02.2.03.02	- <i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>	1 Jumlah dokumen rapat pengawasan bidang Infrastruktur	4 Dok	11 Dokumen
		2 Persentase pelaksanaan perdin bidang Infrastruktur	100%	100%
4.02.02.2.03.03	- <i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>	1 Jumlah dokumen rapat pengawasan bidang kesejahteraan rakyat	4 Dok	2 Dokumen
		2 Persentase pelaksanaan perdin bidang kesejahteraan rakyat	100%	100%
4.02.02.2.03.04	- <i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>	1 Jumlah dokumen rapat pengawasan bidang perekonomian	4 Dok	6 Dokumen
		2 Persentase pelaksanaan perdin bidang perekonomian	100%	100%
4.02.02.2.03.06	- <i>Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan</i>	Jumlah dokumen rapat pengawasan tindak lanjut BPK	1 Dokumen	Nihil
4.02.02.2.03.07	- <i>Pengawasan Penggunaan Anggaran</i>	Jumlah dokumen rapat pengawasan anggaran	1 Dokumen	Nihil
4.02.02.2.04	4 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD	100%	100%
4.02.02.2.04.02	- <i>Bimbingan Teknis DPRD</i>	Jumlah bimtek pimpinan dan anggota DPRD	4 Kali	4 Kali
4.02.02.2.04.04	- <i>Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>	Jumlah pengangkatan kelompok pakar dan/atau tim ahli	3 Orang	3 Orang
4.02.02.2.04.05	- <i>Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi</i>	Jumlah pengangkatan tenaga ahli fraksi	5 Orang	5 Orang
4.02.02.2.04.06	- <i>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>	Persentase fasilitasi rapat hearing dan dialog dengan masyarakat	100%	100%
4.02.02.2.04.07	- <i>Penyusunan Program Kerja DPRD</i>	1 Jumlah dokumen penyusunan program kerja DPRD	12 Dokumen	16 Dokumen
		2 Persentase pelaksanaan perdin Badan Musyawarah	100%	100%
4.02.02.2.05	5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase pelaksanaan reses tepat waktu	100%	100%
4.02.02.2.05.03	- <i>Pelaksanaan Reses</i>	Jumlah dokumen pelaksanaan reses	3 Dokumen	3 Dokumen
4.02.02.2.06	6 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase tercapainya pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	100%	100%
4.02.02.2.06.02	- <i>Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	1 Jumlah dokumen rapat kode etik	1 Dokumen	Nihil
		2 Persentase pelaksanaan perdin Badan kehormatan	100%	100%
4.02.02.2.08	7 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase tercapainya penyelenggaraan fasilitas tugas DPRD	100%	100%
4.02.02.2.08.01	- <i>Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>	Jumlah rapat atau perdin dalam rangka koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	5 Kali	12 Kali

**Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Denpasar**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6 =(5/4)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.02	SEKRETARIAT DPRD				
<b>4.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4.02.01.2.02	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%
4.02.01.2.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	50 Orang	100%
4.02.01.2.06	2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	100%	100%	100%
4.02.01.2.06.02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	100%
4.02.01.2.06.03	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%
4.02.01.2.06.04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%
4.02.01.2.06.05	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
4.02.01.2.06.06	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14 Dokumen	14 Dokumen	100%
4.02.01.2.06.08	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.02.01.2.06.09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.02.01.2.08	3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	100%	100%	100%
4.02.01.2.08.02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.02.01.2.08.04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.02.01.2.09	4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%
4.02.01.2.09.01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 unit	5 unit	100%
4.02.01.2.09.02	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	100%
4.02.01.2.09.07	- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	181 Unit	181 Unit	100%
4.02.01.2.09.10	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	19 Unit	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6 =(5/4)
4.02.01.2.15	5 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	100%	100%
4.02.01.2.15.01	- <i>Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD</i>	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang	45 Orang	100%
4.02.01.2.15.02	- <i>Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD</i>	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%
4.02.01.2.15.03	- <i>Pelaksanaan Medical Check Up DPRD</i>	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	45 Orang	100%
4.02.01.2.16	6 Layanan Administrasi DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	100%	100%	100%
4.02.01.2.16.02	- <i>Fasilitasi Fraksi DPRD</i>	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	5 Laporan	5 Laporan	100%
4.02.01.2.16.03	- <i>Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	22 Laporan	22 Laporan	100%
4.02.02	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>1 Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		<b>2 Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD</b>	<b>86%</b>	<b>88.16%</b>	<b>100%</b>
4.02.02.2.01	1 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	100%	100%
4.02.02.2.01.01	- <i>Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4.02.02.2.01.02	- <i>Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	18 Dokumen	18 Dokumen	100%
4.02.02.2.01.04	- <i>Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/ atau Naskah Akademik</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan Atau Keterangan dan/ Atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
4.02.02.2.02	2 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	100%	100%
4.02.02.2.02.01	- <i>Pembahasan KUA dan PPAS</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4.02.02.2.02.02	- <i>Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4.02.02.2.02.03	- <i>Pembahasan APBD</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4.02.02.2.02.04	- <i>Pembahasan APBD Perubahan</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4.02.02.2.02.06	- <i>Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4.02.02.2.03	3 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	100%	100%	100%
4.02.02.2.03.01	- <i>Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum</i>	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	24 Laporan	24 Laporan	100%
4.02.02.2.03.02	- <i>Pengawasan Urusan</i>	Jumlah Laporan Hasil	24 Laporan	24 Laporan	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6 =(5/4)
	<i>Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			
4.02.02.2.03.03	- <i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	24 Laporan	24 Laporan	100%
4.02.02.2.03.04	- <i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	24 Laporan	24 Laporan	100%
4.02.02.2.03.06	- <i>Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4.02.02.2.03.07	- <i>Pengawasan Penggunaan Anggaran</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4.02.02.2.03.08	- <i>Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah</i>	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4.02.02.2.04	4 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	100%	100%
4.02.02.2.04.02	- <i>Pendalaman Tugas DPRD</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
4.02.02.2.04.03	- <i>Publikasi dan Dokumentasi Dewan</i>	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
4.02.02.2.04.04	- <i>Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 Orang	6 Orang	100%
4.02.02.2.04.05	- <i>Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi</i>	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	5 Orang	100%
4.02.02.2.04.06	- <i>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
4.02.02.2.04.07	- <i>Penyusunan Program Kerja DPRD</i>	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
4.02.02.2.05	5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	100%	100%
4.02.02.2.05.03	- <i>Pelaksanaan Reses</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
4.02.02.2.06	6 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitas Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	100%	100%
4.02.02.2.06.02	- <i>Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	2 Laporan	100%
4.02.02.2.08	7 Fasilitas Tugas DPRD	Persentase Fasilitas Tugas DPRD	100%	100%	100%
4.02.02.2.08.01	- <i>Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD**

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah Sekretariat DPRD Kota Denpasar senantiasa melaksanakannya melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi pada hasil (*result oriented government*) sesuai wewenang, tugas dan fungsinya.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas dan fungsi yang terdiri dari menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan, memfasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD telah menetapkan indikator kinerja utama yaitu :

### **1. Persentase Kepuasan Layanan Kesekretariatan DPRD**

Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD diukur dari laporan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kesekretariatan DPRD. Target indeks kepuasan layanan kesekretariatan DPRD pada tahun 2022 adalah 86%, terealisasi sebesar 87,71% atau sebesar 101,98%. Dengan demikian responden sudah menilai bahwa pelayanan kesekretariatan DPRD Kota Denpasar yang diberikan dikategorikan Baik.

### **2. Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan**

Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan diukur dengan cara rata-rata dari hasil membandingkan antara capaian kinerja dengan rencana kinerja atas penyelenggaraan rapat/ sidang, pelaksanaan perjalanan dinas/ kunjungan kerja, penyediaan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar AKD, serta pelaksanaan reses. Target penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, penganggaran dan pengawasan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100%.

**Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Denpasar**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Keuasan Layanan Kesekretariatan DPRD			85.00%	85.00%	86.00%	87.00%	85.62%	87,71%	86.00%	87.00%	
2	Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar**

#### **a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD**

Permasalahan utama pelayanan pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Sekretariat DPRD Kota Denpasar sesuai tugas dan fungsinya telah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Belum memadai kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
3. Belum optimalnya layanan fasilitasi kesekretariatan DPRD.

Dari ketiga permasalahan tersebut, yang menjadi isu strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah “Belum optimalnya pelayanan fasilitasi kesekretariatan DPRD”.

#### **b. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional**

Apabila isu-isu strategis yang ada ditindaklanjuti melalui strategi-strategi dan arah kebijakan yang dipersiapkan mampu dipenuhi dan berjalan dengan baik, maka capaian visi dan misi Walikota Denpasar, dan capaian program nasional tentu akan tercapai dengan baik, oleh karenanya dibutuhkan kontribusi dan komitmen para pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam mewujudkan capaian yang dimaksud.

**c. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Denpasar**

Sekretariat DPRD dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan, serta berupa lingkungan eksternal organisasi terdiri atas dua faktor strategis, yaitu peluang dan tantangan. Identifikasi terhadap lingkungan strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar menghasilkan faktor-faktor strategis sebagai berikut :

**Faktor Internal**

Di dalam lingkungan internal terdapat dua faktor penting yang berpengaruh yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan.

**Kekuatan :**

- a. Tersedianya anggaran yang cukup memadai.
- b. Tersedianya jumlah pegawai yang cukup memadai.
- c. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- d. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.

**Kelemahan :**

- a. Kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- b. Kurang disiplin dan motivasi kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- c. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- d. Kurangnya inovasi dan kreatifitas SDM dalam upaya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

**Faktor Eksternal**

Di dalam lingkungan eksternal juga terdapat dua faktor penting yang berpengaruh yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan peluang maupun tantangan.

**Peluang :**

- a. Penggunaan teknologi yang semakin berkembang sehingga pelayanan publik dapat diberikan dengan mudah, cepat dan tepat sasaran.
- b. Dukungan kebijakan dan komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Denpasar.
- c. Keterbukaan informasi dan kemudahan komunikasi serta koordinasi dengan stakeholder.
- d. Adanya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

**Tantangan :**

- a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan DPRD.
- b. Semakin besarnya kuantitas agenda kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat.
- c. Dinamika politik yang bersifat dinamis atau berubah-ubah mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
- d. Regulasi dan kebijakan terus diperbaharui untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.
- e. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis dalam keterlibatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

**d. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan**

Berdasarkan penjabaran permasalahan yang terjadi di Sekretariat DPRD Kota Denpasar, untuk menindaklanjuti isu strategis terkait pelayanan itu sendiri yaitu belum optimalnya pelayanan fasilitasi kesekretariatan DPRD. Adapun strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Sekretariat DPRD Kota Denpasar dengan “Meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD dan fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD” melalui :

1. Mengikuti pendalaman tugas sesuai jabatannya seperti workshop/ seminar/ bimbingan teknis / pelatihan / pendidikan / koordinasi dan konsultasi.
2. Pembentukan tim inovasi sebagai tim penggerak untuk meningkatkan kreatifitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari menjadi lebih mudah, sehingga dapat mengoptimalkan penegakan disiplin / motivasi kerja yang lebih baik.

3. Melaksanakan pengadaan barang / jasa yang sesuai kebutuhan dan dilakukan secara epurchasing sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabel dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Serta mendukung percepatan peningkatan PDN dan produk UMKM sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Memperkuat sistem pengawasan internal secara rutin/berkala dengan melakukan dialog kinerja sesuai dengan rentang kendalanya serta didokumentasikan sebagai wujud akuntabilitas kinerja.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar telah dibahas bersama Sekretaris DPRD beserta pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik pada Selasa, 21 Pebruari 2023. Tujuan forum untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, yang dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh Sekretaris DPRD dan perwakilan peserta forum yang hadir. Serta berdasarkan SE Nomor 903/139/BAPPEDA/2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, maka Sekretariat DPRD melakukan penyempurnaan. Rancangan awal renja perangkat daerah menjadi dasar penyusunan RKPD Kota Denpasar. Sesuai dengan hasil pembahasan Musrenbang RKPD Kota Denpasar pada Kamis, 16 Maret 2023. Adapun arahan dari Bappeda Kota Denpasar adalah :

1. Pemenuhan sub kegiatan yang terkait pelaksanaan SPM,
2. Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN selama 14 bulan, TPP dialokasikan 100% untuk 13 bulan,
3. Alokasi perjalanan dinas dilakukan dengan efektif dan efisien serta melihat urgensi kebutuhan,
4. Pemenuhan prioritas pembangunan dengan prinsip efektif dan efisien, dan
5. Penyesuaian usulan sesuai hasil pembahasan pendalaman usulan bersama Walikota Denpasar yang dilaksanakan pada Jumat, 10 Maret 2023.

Usulan rancangan kerja Sekretariat DPRD tahun 2024 dalam rangka memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD dengan 2 program, 13 kegiatan, dan 43 sub kegiatan yang semula dianggarkan sebesar Rp 113.160.430.908,- terdapat rasionalisasi menjadi Rp 86.191.227.059,- atau berkurang sebesar Rp 26.969.203.849,-, hal ini disebabkan karena :

1. Pengurangan jumlah perjalanan dinas dengan mempertimbangkan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.
2. Penyesuaian belanja aset dan pemeliharaan BMD sesuai dengan RKBMD 2024.
3. Penyesuaian belanja operasional rutin sesuai urgensi kebutuhan dengan mempedomani standar harga barang dan standar biaya jasa yang telah disusun oleh BPKAD Kota Denpasar.
4. Penyesuaian beberapa indikator kinerja sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

Review terhadap rancangan awal RKPD dengan membandingkan rancangan Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2024 tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kota Denpasar

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
4.02	SEKRETARIAT DPRD					SEKRETARIAT DPRD					
<b>4.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan</b>	<b>100%</b>	<b>65.988.114.378</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan</b>	<b>100%</b>	<b>63.222.119.059</b>	
<b>4.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>9.007.273.066</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>8.024.689.622</b>	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang / Bulan	9.007.273.066	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang / Bulan	8.024.689.622	
<b>4.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>Persentase Penatausahaan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>4.429.604.799</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>Persentase Penatausahaan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>3.005.698.750</b>	
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	2.463.268.189	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	1.284.143.500	
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	76.450.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	82.272.000	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	206.560.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	196.650.250	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	124.343.100	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	137.490.000	
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	14 Dokumen	675.564.696	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	14 Dokumen	529.995.000	
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	47.400.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	36.900.000	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	836.018.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	738.248.000	
<b>4.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor</b>	<b>100%</b>	<b>2.478.126.356</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor</b>	<b>100%</b>	<b>2.900.769.452</b>	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	600.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	600.000.000	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	1.878.126.356	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	2.300.769.452	
<b>4.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3.020.915.544</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.577.780.616</b>	
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 unit	397.482.136	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 unit	397.473.616	
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	669.603.408	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	598.097.000	
4.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	181 Unit	253.830.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	208 Unit	128.610.000	
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	1.700.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	1.453.600.000	
<b>4.02.01.2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>Persentase Fasilitas Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>46.550.610.613</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>Persentase Fasilitas Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>46.158.562.619</b>	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	44.240.345.613	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	44.240.345.619	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	12 Paket	2.101.640.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	12 Paket	1.808.592.000	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	208.625.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	109.625.000	
<b>4.02.01.2.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>501.584.000</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>554.618.000</b>	
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	20 Laporan	8.900.000	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	35 Laporan	7.650.000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	16 Laporan	492.684.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	28 Laporan	546.968.000	
<b>4.02.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>1. Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan</b>	<b>100%</b>	<b>47.172.316.530</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>1. Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan</b>	<b>100%</b>	<b>22.969.108.000</b>	
			<b>2. Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD</b>	<b>87,00%</b>				<b>2. Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD</b>	<b>87,00%</b>		
<b>4.02.02.2.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>5.364.326.000</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>2.481.150.000</b>	
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	946.324.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	328.830.000	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	18 Dokumen	4.256.002.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	18 Dokumen	2.002.320.000	
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan Atau Keterangan dan/Atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	162.000.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan Atau Keterangan dan/Atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	150.000.000	
4.02.02.2.02.0001	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>100%</b>	<b>1.708.803.000</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>100%</b>	<b>626.498.000</b>	
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	12.000.000	Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	9.000.000	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	12.000.000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	9.000.000	
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	1.660.803.000	Pembahasan APBD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	590.498.000	
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan APBD Perubahan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	12.000.000	Pembahasan APBD Perubahan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	9.000.000	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	12.000.000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	9.000.000	
<b>4.02.02.2.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>13.828.622.000</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>11.962.764.000</b>	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	24 Laporan	3.394.986.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	24 Laporan	3.016.057.000	
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	24 Laporan	3.622.240.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	24 Laporan	3.074.173.000	
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	24 Laporan	3.622.240.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	24 Laporan	3.074.173.000	
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	24 Laporan	3.169.156.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	24 Laporan	2.783.361.000	
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dokumen	4.000.000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dokumen	3.000.000	
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	4.000.000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	3.000.000	
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2 Dokumen	12.000.000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2 Dokumen	9.000.000	
<b>4.02.02.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>Persentase Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>5.798.492.000</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>Persentase Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>4.116.994.000</b>	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	3.092.894.000	Pendalaman Tugas DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5 Dokumen	2.499.624.000	
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 Orang	388.800.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 Orang	324.000.000	
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	324.000.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	270.000.000	
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	24.000.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	10.500.000	
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	12 Dokumen	1.435.998.000	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	12 Dokumen	487.730.000	
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	532.800.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	525.140.000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>4.02.02.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>2.480.000.000</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>2.345.000.000</b>	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	2.480.000.000	Pelaksanaan Reses	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	2.345.000.000	
<b>4.02.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>Persentase Fasilitas Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>490.432.000</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>Persentase Fasilitas Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>163.688.000</b>	
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	490.432.000	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	163.688.000	
<b>4.02.02.2.08</b>	<b>Fasilitas Tugas DPRD</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>Persentase Fasilitas Tugas DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>17.501.641.530</b>	<b>Fasilitas Tugas DPRD</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>Persentase Fasilitas Tugas DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>1.273.014.000</b>	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	17.501.641.530	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	1.273.014.000	
<b>JUMLAH</b>					<b>113.160.430.908</b>	<b>JUMLAH</b>					<b>86.191.227.059</b>

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD**

##### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersinergi pada seluruh aspek pemerintahan mulai dari skala nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, maka dilakukan penyesuaian arah kebijakan dan prioritas pembangunan pusat hingga ke daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar.

Arah kebijakan Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2024 terintegrasi dalam mendukung visi Provinsi Bali yaitu *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru dan mewujudkan misi Provinsi Bali ke-22 yaitu Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah.

Selaras juga dengan visi Kota Denpasar yaitu Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju dan mewujudkan Misi Kota Denpasar ke-3 yaitu kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tema pembangunan Kota Denpasar Tahun 2024 adalah Penguatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Menuju Denpasar Maju.

##### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar**

Tujuan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2024 adalah meningkatnya pelayanan kesekretariatan DPRD, dengan sasaran strategis berupa pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD. Strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Strategi tersebut dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas SDM baik ASN dilingkungan Sekretariat DPRD Kota Denpasar maupun Pimpinan beserta Anggota DPRD Kota Denpasar, dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD.

Untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar, maka dirumuskan indikator kinerja utama yang dipergunakan untuk meningkatkan dan/atau memperbaiki kualitas penetapan kebijakan, kualitas kinerja pelayanan kesekretariatan, dan peningkatan akuntabilitas

kinerja pada Pemerintah Kota Denpasar yang diukur dan didukung dengan data-data yang akuntabel.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Strategis**

	Uraian	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Tujuan</b>	Meningkatnya pelayanan kesekretariatan DPRD	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	85%	86%	87%	87,5%	88%
<b>Sasaran</b>	Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%

Matrik hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar.

Visi : Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju				
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
Misi 3 : kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )				
	Tujuan RKPD : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Predikat SAKIP	BB (75,50)
	Tujuan OPD : Meningkatkan Pelayanan Kesekretariatan DPRD			
		Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%

### 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah :
  - Melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar yang tertuang dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 dan berpedoman pada nomenklatur penyelenggaraan fungsi penunjang tugas dan fungsi DPRD yang tertuang dalam Permendagri Nomor 104 Tahun 2016;

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar hingga tahun 2025 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021;
- Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
- Strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan daerah Kota Denpasar tahun 2024; dan
- Menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender, dalam hal kesetaraan pemberian hak perolehan kesempatan peningkatan wawasan, melaksanakan pemberian hak cuti khusus pada wanita hamil / melahirkan, mengadakan pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan untuk kesetaraan gender khususnya pada jumlah ketersediaan dan perawatan kamar mandi untuk laki-laki dan perempuan.

b) Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Rencana kerja pada Tahun 2024 terdiri dari 2 Program, 13 Kegiatan, 43 Sub Kegiatan dengan kebutuhan dana/ pagu indikatif sebesar Rp 86.191.227.059,- yang bersumber dari APBD. Perumusan program kegiatan dalam rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

**Program Priotitas / Utama :**

**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

Program ini bertujuan untuk pemenuhan fasilitasi pelayanan Sekretariat DPRD Kota Denpasar terhadap tugas dan fungsi DPRD secara profesional, transparan dan akuntabel dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2024.

**Program Penunjang :**

**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan penatausahaan administrasi kesekretariatan DPRD bagian umum dan keuangan, untuk menunjang sarana dan prasarana kegiatan-kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Denpasar, serta meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban perangkat daerah sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang optimal, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

**Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Denpasar**

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>100%</b>	<b>63.222.119.059</b>	<i>APBD</i>		<b>100%</b>	<b>72.586.925.816</b>
4.02.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>100%</b>	<b>8.024.689.622</b>	<i>PAD, DAU</i>		<b>100%</b>	<b>9.908.000.372</b>
4.02.01.2.02.0001	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>48 Orang / Bulan</i>	<i>8.024.689.622</i>	<i>PAD, DAU</i>		<i>49 Orang / Bulan</i>	<i>9.908.000.372</i>
4.02.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penatausahaan Administrasi Umum</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>100%</b>	<b>3.005.698.750</b>	<i>APBD</i>		<b>100%</b>	<b>4.872.565.279</b>
4.02.01.2.06.0002	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>14 Paket</i>	<i>1.284.143.500</i>	<i>APBD</i>		<i>11 Paket</i>	<i>2.709.595.008</i>
4.02.01.2.06.0003	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>5 Paket</i>	<i>82.272.000</i>	<i>APBD</i>		<i>3 Paket</i>	<i>84.095.015</i>
4.02.01.2.06.0004	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>3 Paket</i>	<i>196.650.250</i>	<i>APBD</i>		<i>3 Paket</i>	<i>227.216.880</i>

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	1 Paket	137.490.000	APBD		1 Paket	136.777.410
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	14 Dokumen	529.995.000	APBD		14 Dokumen	743.121.166
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	12 Laporan	36.900.000	APBD		12 Laporan	52.140.000
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	12 Laporan	738.248.000	APBD		12 Laporan	919.619.800
<b>4.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>100%</b>	<b>2.900.769.452</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>2.725.938.992</b>
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	12 Laporan	600.000.000	APBD		12 Laporan	660.000.000
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	12 Laporan	2.300.769.452	APBD		12 Laporan	2.065.938.992
<b>4.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>100%</b>	<b>2.577.780.616</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>3.323.007.099</b>

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	5 unit	397.473.616	APBD		5 unit	437.230.350
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	29 Unit	598.097.000	APBD		29 Unit	736.563.749
4.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	208 Unit	128.610.000	APBD		208 Unit	279.213.000
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	25 Unit	1.453.600.000	APBD		25 Unit	1.870.000.000
<b>4.02.01.2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>100%</b>	<b>46.158.562.619</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>51.205.671.674</b>
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	45 Orang/Bulan	44.240.345.619	APBD		45 Orang/Bulan	48.664.380.174
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	12 Paket	1.808.592.000	APBD		12 Paket	2.311.804.000
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	45 Orang	109.625.000	APBD		45 Orang	229.487.500

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	100%	554.618.000	APBD		100%	551.742.400
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	35 Laporan	7.650.000	APBD		35 Laporan	9.790.000
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	28 Laporan	546.968.000	APBD		28 Laporan	541.952.400
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan 2. Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	100% 87,00%	22.969.108.000	APBD APBD		100% 87,50%	51.889.548.183
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	100%	2.481.150.000	APBD		100%	5.900.758.600
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	12 Dokumen	328.830.000	APBD		12 Dokumen	1.040.956.400
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	18 Dokumen	2.002.320.000	APBD		18 Dokumen	4.681.602.200

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan Atau Keterangan dan/ Atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	3 Dokumen	150.000.000	APBD		3 Dokumen	178.200.000
<b>4.02.02.2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>100%</b>	<b>626.498.000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>1.879.683.300</b>
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2 Dokumen	9.000.000	APBD		2 Dokumen	13.200.000
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2 Dokumen	9.000.000	APBD		2 Dokumen	13.200.000
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2 Dokumen	590.498.000	APBD		2 Dokumen	1.826.883.300
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2 Dokumen	9.000.000	APBD		2 Dokumen	13.200.000
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2 Dokumen	9.000.000	APBD		2 Dokumen	13.200.000
<b>4.02.02.2.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>100%</b>	<b>11.962.764.000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>15.211.484.200</b>

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	24 Laporan	3.016.057.000	APBD		24 Laporan	3.734.484.600
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	24 Laporan	3.074.173.000	APBD		24 Laporan	3.984.464.000
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	24 Laporan	3.074.173.000	APBD		24 Laporan	3.984.464.000
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	24 Laporan	2.783.361.000	APBD		24 Laporan	3.486.071.600
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2 Dokumen	3.000.000	APBD		2 Dokumen	4.400.000
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2 Dokumen	3.000.000	APBD		2 Dokumen	4.400.000
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2 Dokumen	9.000.000	APBD		2 Dokumen	13.200.000
<b>4.02.02.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>100%</b>	<b>4.116.994.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>6.378.341.200</b>

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	5 Dokumen	2.499.624.000	APBD		6 Dokumen	3.402.183.400
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	6 Orang	324.000.000	APBD		6 Orang	427.680.000
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	5 Orang	270.000.000	APBD		5 Orang	356.400.000
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	12 Dokumen	10.500.000	APBD		12 Dokumen	26.400.000
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	12 Dokumen	487.730.000	APBD		12 Dokumen	1.579.597.800
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	12 Dokumen	525.140.000	APBD		12 Dokumen	586.080.000
<b>4.02.02.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>100%</b>	<b>2.345.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>2.728.000.000</b>
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	2.345.000.000	APBD		3 Dokumen	2.728.000.000

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>4.02.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>100%</b>	<b>163.688.000</b>	<i>APBD</i>		<b>100%</b>	<b>539.475.200</b>
<i>4.02.02.2.06.0002</i>	<i>Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>163.688.000</i>	<i>APBD</i>		<i>2 Laporan</i>	<i>539.475.200</i>
<b>4.02.02.2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Persentase Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</b>	<b>100%</b>	<b>1.273.014.000</b>	<i>APBD</i>		<b>100%</b>	<b>19.251.805.683</b>
<i>4.02.02.2.08.0001</i>	<i>Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>1.273.014.000</i>	<i>APBD</i>		<i>12 Dokumen</i>	<i>19.251.805.683</i>
<b>J U M L A H</b>					<b>86.191.227.059</b>				<b>124.476.473.999</b>

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Perumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

**Tabel 4.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2024**

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan</b>	<b>100%</b>	<b>63.222.119.059</b>
<b>I</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>8.024.689.622</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang / Bulan	8.024.689.622
<b>II</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penatausahaan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>3.005.698.750</b>
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	1.284.143.500
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	82.272.000
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	196.650.250
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	137.490.000
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	14 Dokumen	529.995.000
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	36.900.000
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	738.248.000
<b>III</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor</b>	<b>100%</b>	<b>2.900.769.452</b>
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	600.000.000
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	2.300.769.452
<b>IV</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.577.780.616</b>
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 unit	397.473.616
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	598.097.000
13	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	208 Unit	128.610.000
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	25 Unit	1.453.600.000
<b>V</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>46.158.562.619</b>
15	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/ Bulan	44.240.345.619

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
16	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	12 Paket	1.808.592.000
17	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	109.625.000
<b>VI</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>554.618.000</b>
18	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	35 Laporan	7.650.000
19	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	28 Laporan	546.968.000
<b>B</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>1. Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan</b>	<b>100%</b>	<b>22.969.108.000</b>
		<b>2. Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD</b>	<b>87%</b>	
<b>VII</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>2.481.150.000</b>
20	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	328.830.000
21	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	18 Dokumen	2.002.320.000
22	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan Atau Keterangan dan/Atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	150.000.000
<b>VIII</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>100%</b>	<b>626.498.000</b>
23	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	9.000.000
24	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	9.000.000
25	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	590.498.000
26	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	9.000.000
27	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	9.000.000
<b>IX</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah</b>	<b>100%</b>	<b>11.962.764.000</b>
28	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	24 Laporan	3.016.057.000
29	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	24 Laporan	3.074.173.000
30	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	24 Laporan	3.074.173.000
31	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	24 Laporan	2.783.361.000
32	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dokumen	3.000.000
33	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	3.000.000
34	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2 Dokumen	9.000.000
<b>X</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>4.116.994.000</b>
35	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5 Dokumen	2.499.624.000
36	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	525.140.000
37	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 Orang	324.000.000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
38	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	270.000.000
39	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	10.500.000
40	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	12 Dokumen	487.730.000
<b>XI</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>2.345.000.000</b>
41	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	2.345.000.000
<b>XII</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Persentase Fasilitas Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>163.688.000</b>
42	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	163.688.000
<b>XIII</b>	<b>Fasilitas Tugas DPRD</b>	<b>Persentase Fasilitas Tugas DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>1.273.014.000</b>
43	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	1.273.014.000
<b>TOTAL</b>				<b>86.191.227.059</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2023 atas hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2023. Perumusan Perubahan Rencana Kerja ini digunakan sebagai sarana pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2023.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar sampai dengan Triwulan II tahun 2023 adalah telah ditetapkan pergeseran anggaran sebanyak 2 (dua) kali dan pencapaian realisasi fisik kegiatan sebesar 42,39% dengan serapan anggaran sebesar 35,56% atau Rp 33.227.526.083,- dari Rp 93.442.368.686,- atau capaian serapan anggaran sebesar 66,38% dari target anggaran Triwulan II sebesar Rp 50.051.463.891. Perubahan Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat DPRD Tahun 2023 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dimaksud melalui 2 program, 13 kegiatan dan 43 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan terdapat penambahan sebesar Rp 5.329.432.064,- sehingga rancangan anggaran perubahan menjadi Rp 98.771.800.750,-.

Demikian Perubahan Rencana Kerja ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Denpasar, 25 Agustus 2023  
Sekretaris DPRD Kota Denpasar



I. Gde Made Bhaju Pravita, MM  
NIP. 196811141998031003

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah  
Kota Denpasar Tahun 2024**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2.	Pengolahan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kota Denpasar tahun lalu berdasarkan renstra Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD Kota Denpasar	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Denpasar dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12.	Program dan Kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Denpasar dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Denpasar telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan	√			

Denpasar, 13 Juli 2023  
Sekretaris DPRD Kota Denpasar



**Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM**  
NIP. 196811141998031003

**Petunjuk Pengisian:**

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan;
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.